BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Lingkungan
Edisi : 5 Februari 2008
Halaman : 14

Lingkungan Hidup Prioritas Pembangunan

[JAKARTA] Meningkatnya kecenderungan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintah meminta kepada semua pihak dan seluruh sektor pembangunan untuk menempatkan isu lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan. Prioritas lingkungan hidup harus dijadikan dasar dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan.

Demikian salah satu butir Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah dalam siaran pers yang diterima *SP,* Senin (4/2). Untuk itu, Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan Bidang Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diwadahi dengan lembaga teknis daerah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Dida Gardera, Selasa (5/2), mengatakan, meskipun Peraturan Pemerintah (PP) 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih memungkinkan bagi daerah untuk menggabungkan urusan bidang lingkungan hidup dengan urusan lain yang serupa, tetapi dalam rangka mengejawantahkan semangat mengarusutamakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, kelembagaan yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup hendaknya tidak digabung dengan urusan lain.

"Hal ini penting agar ke depan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara optimal," kata Dida.

Menanggapi surat edaran dua menteri tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sonny Keraf menyatakan dukungannya. "Tetapi jangan hanya sampai surat edaran saja. Yang penting pelaksanaan dan pengawasan di lapangan," ujarnya.

Menurut dia, langkah nyata yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut adalah dengan menghidupkan kembali Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup